BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan Insperktorat kota Bandung dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah singkat Inspektorat kota Bandung

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terlepas dari peran aparatur pemerintah pada saat melaksanakan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Instansi pengawasan dan pemeriksaan intern yang dilakukan pada pemerintah kota Bandung dilakukan oleh inspektorat kota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

- Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2005;
- Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nmr 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahn daerah;
- Keputusan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2001 tentang pengawasan repressif kebijakan daerah;
- Keputusan walikota bandung 989 tahun 2002 tentang pedoman operasional pengawasan;
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah;
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Visi inspektorat kota bandung adalah

“terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat melalui pengawasan yang profesional dan bertanggungjawab”.

Misi inspektorat kota bandung adalah

- Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, peraturan yang telah ditetapkan
- Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/ fungsional;
- Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta responsif;
- Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah;
- Menumbuhkan sinergi antar aparat pengawasan.

Berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi inspektorat kota bandung dalam pasal 4 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi inspektorat kota bandung adalah:

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat mempunyai fungsi:

- Perencanaan program pengawasan
- Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
- Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat.

4.1.1.2 Stuktur Organisasi Inspektorat kota Bandung

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung :

a. Inspektur
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah I
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah I
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah II
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah II
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah III
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah III
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
    1. Seksi Pengawasan Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah IV
    2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintah Wilayah IV
    3. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV
g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.1.3 Job Description Inspektorat kota Bandung

Berikut Tugas – tugas pokok masing - masing Jabatan berdasarkan Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawsan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyediakan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
- Pelaksanaa penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah
- Pelaksanaan penyusunan bahan / data pembinaan teknis fungsional
- Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan
- Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat, dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

- Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan

- Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan

- Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan

- Penyusunan anggaran Inspektorat, dan

- Pelaporan kegiatan perencanaan

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan

- Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

- Peaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
- Penyusunan statistik hasil pengawasan
- Penyelenggaraan kerjasama pengawasan, dan
- Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumah tanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas

Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, dan

Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi / satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja nya. Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

1. Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawsan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyediakan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
    b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
    c. Pelaksanaa penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah
    d. Pelaksanaan penyusunan bahan / data pembinaan teknis fungsional
    e. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan
    f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
    g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat, dan
    h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
    a. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan
    b. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan
    c. Penyiapan rancangan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
    d. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan
    e. Penyusunan anggaran Inspektorat, dan
    f. Pelaporan kegiatan perencanaan
4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
    b. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan
    c. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
    d. Peaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan
    e. Penyusunan statistik hasil pengawasan
    f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan, dan
    g. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumah tanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
    b. Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
    c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, dan
    d. Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum
6. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi / satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja nya. Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
    a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawaasan di wilayah kerjanya
    c. Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
    d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, dan
    e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan
7. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan

urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengusulan program Pengawasan bidang Pembangunan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan, dan
e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan

8. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan
   c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan
   d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang Pemerintahan
9. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan sesuai

wilayah kerja nya. Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan, dan
e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan

10 . Kelompok Jabatan Fungsional pengaturan Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjanganya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

4.1.1.4 Aktivitas Inspektorat kota Bandung

Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap instansi / satuan kerja perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja. Wilayah sebagaimana dimaksud terdiri dari instansi / satuan kerja perangkat daerah yaitu :

Wilayah I, meliputi :

1 . Dinas Bina Marga dan Pengairan

2 . Dinas Perhubungan

3 . Dinas Kebakaran

4 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5 . Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

6 . Badan Kepegawaian Daerah

7 . Satuan Polisi Pamong Praja

8 . Rumah Sakit Umum Daerah

9 . Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat

10 . Bagian Pemerintahan Umum

11 . Bagian Keuangan

12 . Kecamatan Sukasari

13 . Kecamatan Sukajadi

14 . Kecamatan Cicendo

15 . Kecamatan Andir

16 . Kecamatan Cidadap

17 . Kecamatan Coblong

18 . Kecamatan Bandung Wetan

19 . Kecamatan Cibeunying Kaler

Wilayah II, meliputi :

1 . Asisten Pemerintahan

2 . Dinas Pendapatan

3 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 . Dinas Pendidikan

5 . Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

6 . Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

7 . Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

8 . Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

9 . Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

10 . Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

11 . Bagian Pengelolaan Aset

12 . Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

13 . Kecamatan Cibeunying Kidul

14 . Kecamatan Sumur Bandung

15 . Kecamatan Batununggal

16 . Kecamatan Regol

17 . Kecamatan Lengkong

18 . Kecamatan Kiaracondong

19 . Kecamatan Antapani

Wilayah III, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

2 . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

3 . Dinas Sosial

4 . Dinas Kesehatan

5 . Dinas Pertanian

6 . Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7 . Badan Kesbang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat

8 . Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

9 . Perusahaan Daerah Kebersihan

10 . Bagian Hukum dan HAM

11 . Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

12 . Bagian Umum dan Perlengkapan

13 . Kecamatan Bandung Kulon

14 . Kecamatan Bojongloa Kaler

15 . Kecamatan Babakan Ciparay

16 . Kecamatan Bojongloa Kidul

17 . Kecamatan Astanaanyar

18 . Kecamatan Bandung Kidul

19 . Kecamatan Buah batu

Wilayah IV, meliputi :

1 . Asisten Administrasi Umum

2 . Dinas Tenaga Kerja

3 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan

4 . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 . Dinas Pertamanan

6 . Badan Komunikasi dan Informatika

7 . Kantor Pengelolaan Pemakaman

8 . Perusahaan Daerah Air Minum

9 . Bagian Perekonomian

10 . Bagian Ketahanan Pangan

11 . Bagian Tata Usaha Pimpinan

12 . Kecamatan Rancasari

13 . Kecamatan Panyileukan

14 . Kecamatan Gede Bage

15 . Kecamatan Cibiru

16 . Kecamatan UjungBerung

17 . Kecamatan Mandalajati

18 . Kecamatan Cinambo

19 . Kecamatan Arcamanik

4.2 Karakteristik Responeden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 20 responden. Untuk variabel X, Y dan Z kuesioner diberikan kepada objek yaitu Auditor Inspektorat Kota Bandung. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut.

Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4. 1. Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	15	75%
Perempuan	5	25%
Jumlah	20	100%

Sumber: data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang atau sebesar 75% dan responden yang kelamin perempuan berjumlah 5 orang atau sebesar 25 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada Auditor Inspektorat kota Bandung lebih banyak responden laki-laki, karena laki-laki lebih tegas dan lebih siap kelapangan untuk beragumentasi dan pada kenyataanya pegawai laki-laki lebih banyak dari pada perempuan pada Inspektorat Kota Bandung.

1. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakterisktik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentasi

<30 Tahun	2	10%
31-40 Tahun	16	80%
41-50 Tahun	2	10%
>50 Tahun	0	0%
Jumlah	20	100%

Sumber: data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 10%, 31-40 tahun berjumlah 16 orang atau sebesar 80%, 41-50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada auditor inspektorat kota bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai auditor inspektorat kotabandung berusia 31-40.

2. Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir

Untuk mengetahui responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah responden	Persenrase %
SMA atau sederajat	0	0%
Diploma III	0	0%

Strata I (S1)	14	70%
Strata II (S2)	6	30%
Jumlah	20	100%

Sumber: data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 14 orang atau sebesar 70% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 6 orang atau sebesar 30%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai auditor inspektorat kota bandung rata-rata lulusan Strata I (S1).

3. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama bekerja	Jumlah responden	Persentase %
s/d 1 tahun	0	0%
1 – 5 tahun	6	30%
5 – 10 Tahun	11	55%
>10 Tahun	3	15%

Jumlah	20	100%

Sumber: data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama 1-5 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 30% dan responden dengan lama kerja 5-10 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 55 %, dan responden dengan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 15%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung pada Inspektorat Kota Bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung rata-rata telah bekerja antara 5-10 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Analisis Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 20 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Inspektorat Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Rekapulasi skor jawaban Responden Mengenai Standar Akuntansi Pemerintah

Tabel 4. 5. Rekapulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Standar Akuntansi Pemerintah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah	149	200	74,5	Baik
2	Konsep Penyajian Laporan Keuangan	146	200	73	Baik
3	Konsep Laporan Realisasi Anggaran	150	200	75	Baik
4	Konsep Akuntansi Persediaan	279	400	69,75	Baik
5	Konsep akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan	200	300	66,67	Cukup
6	Konsep akuntansi kewajiban	68	100	68	Cukup
7	Konsep Koreksi Kesalahan atas laporan keuangan	67	100	67	Cukup
TOTAL		1059	1500	70,6	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan*Nilai tertinggi*Jumlah Responden

Sumber: Data primer telah diolah,2012

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dapat dikatakan sudah Cukup Baik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu bahwa tanpa penerapan SAP, diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas keuangan sebesar 66,16% dan dapat dikategorikan Cukup Baik (Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh: 2008). Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Standar

Pemerintah pada auditor di Inspektorat Kota Bandung berdasarkan tiap indikator diatas:

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pembuatan laporan keuangan dinas yang anda audit sesuai dengan Kerangka konseptual yang terkandung di dalam Standard Akuntansi Pemerintah	F	0	0	7	12	1	74
		%	0	0	35	60	5	100%
2	Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok di dinas yang anda audit sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah	F	0	0	6	13	1	75
		%	0	0	30	65	5	100%
Total		F	0	0	13	17	2	146
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 73% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{146}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{149}{200} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 74,5%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Pembuatan laporan keuangan dinas yang diaudit sesuai dengan Kerangka konseptual yang terkandung di dalam Standard Akuntansi Pemerintah ditanggapi 35% responden cukup baik dan sebesar 60% responden berpendapat mengenai Pembuatan laporan keuangan dinas yang diaudit sesuai dengan Kerangka konseptual yang terkandung di dalam Standard Akuntansi Pemerintah.Sisanya 5% menganggap bahwa mengenai Pembuatan laporan keuangan dinas yang diaudit sangat sesuai dengan Kerangka konseptual yang terkandung di dalam Standard Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok di dinas yang audit cukup sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah sebesar 30% responden dan 65% responden berpendapat Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set

laporan keuangan pokok di dinas yang anda audit sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Sisanya 5% menganggap bahwa Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok di dinas yang diaudit sangat sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah.

Konsep Penyajian Laporan Keuangan

Indikator Konsep Penyajian Laporan Keuangan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsep Penyajian Laporan Keuangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, serta basis akuntansi untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana di dinas yang anda audit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	8	11	1	73
		%	0	0	40	55	5	100%
4	pos-pos yang tercakup di dalam Neraca di dinas yang anda audit	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%

	sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah							
Total		F	0	0	15	24	1	149
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 73% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{146}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{146}{200} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 73%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, serta basis akuntansi untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana di dinas yang diaudit cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, ditanggapi 55% responden dan sebesar 40% responden berpendapat mengenai Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, serta basis akuntansi untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana di dinas yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sisanya 5%

menganggap bahwa mengenai Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, serta basis akuntansi untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana di dinas yang diaudit sangat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sangat baik.

Diperoleh jawaban responden mengenai pos-pos yang tercakup di dalam Neraca di dinas yang diaudit cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 35% responden dan 65% responden berpendapat pos-pos yang tercakup di dalam Neraca di dinas yang anda audit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Konsep Laporan Realisasi Anggaran

Indikator Konsep Laporan Realisasi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8. Distribusi Jawaban Respondeng Mengenai Laporan Realisasi Anggaran

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi merupakan unsur penting untuk mengukur kinerja lembaga	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%

6	Pos-pos yang tercakup di dalam Laporan Realisasi Anggaran di dinas yang anda audit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	3	17	0	77
		%	0	0	15	85	0	100%
Total		F	0	0	10	30	0	150
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 75%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 75% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{150}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{150}{200} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 75%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi merupakan unsur penting untuk mengukur kinerja lembaga, ditanggapi 35% responden cukup baik dan sebesar 65% responden berpendapat mengenai

Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi merupakan unsur penting untuk mengukur kinerja lembaga.

Diperoleh jawaban responden mengenai Pos-pos yang tercakup di dalam Laporan Realisasi Anggaran di dinas yang diaudit cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 15% responden dan 85% responden berpendapat Pos-pos yang tercakup di dalam Laporan Realisasi Anggaran di dinas yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Konsep Akuntansi Persediaan

Indikator konsep akuntansi persediaandiukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsep Akuntansi Persediaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dan belanja di dinas yang anda audit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%
8	Informasi-informasi yang disajikan oleh dinas yang anda audit dalam catatan atas laporan	F	0	0	13	7	0	67
		%	0	0	65	35	0	100%

	keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah							
9	Dalam membuat catatan atas laporan keuangan, di dinas yang anda audit sudah membuat referensi silang antara pos yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca dengan informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	9	11	0	71
		%	0	0	45	55	0	100%
10	Di dinas yang anda audit dapat mendefinisikan barang atau perlengkapan yang termasuk ke dalam persediaan dan mencatat nilai persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
Total		F	0	0	41	39	0	279
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 69,75%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9. diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 69,75% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{4x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{400} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 69,75%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dan belanja di dinas yang anda audit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dan belanja di dinas yang diaudit cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, ditanggapi 35% responden cukup baik dan sebesar 65% responden berpendapat mengenai Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dan belanja di dinas yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai Informasi-informasi yang disajikan oleh dinas yang diaudit dalam catatan atas laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai sesuai cukup dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 65% responden dan 35% responden berpendapat Informasi-informasi yang disajikan oleh dinas yang anda audit dalam catatan atas laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai membuat catatan atas laporan keuangan, di dinas yang diaudit sudah membuat referensi silang antara pos yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca dengan informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 45% responden dan 55% responden berpendapat Dalam membuat catatan atas laporan keuangan, di dinas yang anda audit sudah membuat referensi silang antara pos yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan neraca dengan informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai dinas dapat mendefinisikan barang atau perlengkapan yang termasuk ke dalam persediaan dan mencatat nilai persediaan cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 60% responden dan 40% responden berpendapat dinas dapat mendefinisikan barang atau perlengkapan yang termasuk ke dalam persediaan dan mencatat nilai persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

5. Konsep Akuntansi Aset Tetap Dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Indikator konsep akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 10. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsep Akuntansi Aset Tetap dan Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Di dinas yang anda audit, pengklasifikasikan kekayaan yang termasuk ke dalam aset tetap dan menilai aset tetap sesuai dengan biaya perolehan atau nilai yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	11	9	0	69
		%	0	0	55	45	0	100%
12	Di dinas yang anda audit, pembukukan nilai dari konstruksi dalam pengerjaan dan mengklasifikasikannya kedalam aset tetap pada saat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	13	7	0	67
		%	0	0	65	35	0	100%
13	Di dinas yang anda audit, Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan	F	0	6	4	10	0	64
		%	0	30	20	50	0	100%

	mengungkapkannya secara memadai ke dalam Laporan keuangan							
Total		F	0	6	28	26	0	200
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 66,67%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabe 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 66,67% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{200}{3x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{200}{300} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 66.67%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai pengklasifikasikan kekayaan yang termasuk ke dalam aset tetap dan menilai aset tetap sesuai dengan biaya perolehan atau nilai yang wajar cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, ditanggapi 55% responden cukup baik dan sebesar 45% responden berpendapat pengklasifikasikan kekayaan yang termasuk ke dalam aset tetap dan menilai aset tetap sesuai dengan biaya perolehan atau nilai yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden pembukukan nilai dari konstruksi dalam pengerjaan dan mengklasifikasikannya kedalam aset tetap pada saat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 65% responden dan 35% responden berpendapat pembukukan nilai dari konstruksi dalam pengerjaan dan mengklasifikasikannya kedalam aset tetap pada saat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mengungkapkannya secara memadai ke dalam Laporan keuangan sebesar 30% responden dan 20% responden berpendapat Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mengungkapkannya secara memadai ke dalam Laporan keuangan. Serta 50% responden berpendapat Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mengungkapkannya secara memadai ke dalam Laporan keuangan.

6. Konsep Akuntansi Kewajiban

Indikator konsep akuntansi kewajiban dalam pengerjaan menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsep Akuntansi Kewajiban

No	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden	Jumlah

			1	2	3	4	5	Skor
14	Di dinas yang anda audit, pengklasifikasikan, perhitung, pencatatan, dan pelaporan kewajiban atau utang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
Total		F	0	6	12	8	0	68
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 68%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 68% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{68}{1x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{68}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 68%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai pengklasifikasikan, perhitung, pencatatan, dan pelaporan kewajiban atau utang

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, ditanggapi 60% responden cukup baik dan sebesar 40% responden pengklasifikasikan, perhitung, pencatatan, dan pelaporan kewajiban atau utang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

7. Konsep Koreksi Kesalahan Atas Laporan Keuangan

Indikator konsep koreksi kesalahan atas laporan keuangan menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Konsep Koreksi Kesalahan Atas Laporan Keuangan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
15	Di dinas yang anda audit, bila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, koreksi atas kesalahan tersebut baik yang terjadi pada saat periode berjalan maupun kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	F	0	0	13	7	0	67
		%	0	0	65	35	0	100%
Total		F	0	0	13	7	0	67
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 67%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 68% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{67}{1x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{67}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 67%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai bila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, koreksi atas kesalahan tersebut baik yang terjadi pada saat periode berjalan maupun kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, cukup sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, ditanggapi 65% responden dan sebesar 35% responden bila terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, koreksi atas kesalahan tersebut baik yang terjadi pada saat periode berjalan maupun kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3.2 **Analisis Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Kota Bandung**

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 20 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Rekapulasi skor jawaban Responden Mengenai Standar Akuntansi Pemerintah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Relevan	271	400	67,5	Cukup Baik
2	Andal	287	400	71,75	Baik
3	Dapat Dibandingkan	145	200	72,5	Baik
4	Dapat Dipahami	135	200	67,5	Cukup Baik
TOTAL		838	200	69,83	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan*Nilai tertinggi*Jumlah Responden

Sumber: Data primer telah diolah,2012

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan dapat dikatakan sudah Baik. Hal

ini didasarkan dari tabel kriteria presentase tanggapan responden menurut Umi Narimawati:2007, dengan hasil skor tanggapan responden sebesar 69,83%, termasuk dalam kategori baik.

Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada auditor di Inspektorat Kota Bandung berdasarkan tiap indikator diatas:

4. Relevan

Indikator relevan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 14. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Relevan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit sesuai dengan waktu pelaporan (tepat waktu)	F	0	0	15	5	0	65
		%	0	0	75	25	0	100%
17	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit memberikan informasi yang dibutuhkan(lengkap)	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
18	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
19	Laporan Keuangan yang dibuat	F	0	0	10	10	0	70

	oleh dinas yang anda audit memberikan umpan balik yang baik untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu	%	0	0	50	50	0	100%
Total		F	0	0	49	31	0	271
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 69,75%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 69,75% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{4x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{400} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 69,75%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit sesuai dengan waktu pelaporan (tepat waktu), ditanggapi 75% responden cukup baik dan sebesar 25% responden berpendapat mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit sesuai dengan waktu pelaporan (tepat waktu).

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit memberikan informasi yang dibutuhkan (lengkap), sebesar 60% responden cukup baik dan 40% responden Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit memberikan informasi yang dibutuhkan(lengkap).

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, sebesar 60% tanggapan responden cukup baik dan 40% responden berpendapat Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit memberikan umpan balik yang baik untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu sebesar 50% tanggapan responden cukup dan 50% responden berpendapat Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit memberikan umpan balik yang baik untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

Andal

Indikator andal diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 15. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Andal

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
20	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit sesuai dengan kenyataan (penyajiannya jujur)	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%
21	Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
22	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit bebas dari pengertian yang menyesatkan	F	0	0	9	11	0	71
		%	0	0	45	55	0	100%
23	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit, diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu	F	0	0	5	15	0	75
		%	0	0	25	75	0	100%
Total		F	0	0	33	47	0	287

Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71,75%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 71,75% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{287}{4x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{287}{400} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 71,75%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit sesuai dengan kenyataan (penyajiannya jujur), ditanggapi 35% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 65% responden berpendapat mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit sesuai dengan kenyataan (penyajiannya jujur).

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, sebesar 60% tanggapan responden cukup baik dan 40% responden

berpendapat Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit bebas dari pengertian yang menyesatkan, sebesar 45% tanggapan responden cukup baik dan 55% responden berpendapat Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit bebas dari pengertian yang menyesatkan.

Diperoleh jawaban responden mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas, diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu sebesar 25% tanggapan responden cukup baik dan 75% responden berpendapat Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas, diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

4. Dapat Dibandingkan

Indikator dapat dibandingkan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 16. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dibandingkan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit,	F	0	0	8	12	0	72
		%	0	0	40	60	0	100%

	bermanfaat dalam pengambilan keputusan							
25	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%
Total		F	0	0	15	25	0	145
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 72,5%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 72,5% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{145}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{145}{200} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 72,5%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit, bermanfaat dalam pengambilan

keputusan, ditanggapi 40% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 60% responden berpendapat mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit, bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Diperoleh jawaban responden mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, sebesar 35% tanggapan responden cukup baik dan 65% responden berpendapat baik mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang diaudit dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

5. Dapat Dipahami

Indikator dapat dipahami diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 17. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Dipahami

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
26	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit, dapat dipahami oleh pengguna	F	0	0	5	15	0	75
		%	0	0	25	75	0	100%
27	Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas yang anda audit, dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	F	0	2	16	2	0	60
		%	0	10	80	10	0	100%
Total		F	0	2	21	17	0	135
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 67,5%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 67,5% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{135}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{135}{200} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 67,5%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh dinas, dapat dipahami oleh pengguna, ditanggapi 25% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 75% responden menanggapi baik mengenai, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh dinas, dapat dipahami oleh pengguna.

Diperoleh jawaban responden mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh dinas, dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, sebesar 10% tanggapan responden kurang baik dan 80% responden berpendapat cukup baik mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas, dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Serta 10% tanggapan responden baik mengenai Laporan Keuangan yang dibuat oleh dinas, dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.3.3 **Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung**

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 20 orang auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Untuk mendapatkan gambaran Akuntabilitas Kinerja di Dinas Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator pada tabel berikut:

Tabel 4. 18 Rekapulasi skor jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Komitmen	72	100	72	Baik
2	Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten	230	300	76,67	Baik
3	Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	73	100	73	Baik
4	Beorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh	68	100	68	cukup baik
5	Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan	141	200	70,5	Baik
TOTAL		584	800	73	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan*Nilai tertinggi*Jumlah Responden

Sumber: Data primer telah diolah,2012

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat dikatakan sudah Baik. Hal ini didasarkan dari tabel kriteria presentase tanggapan responden menurut Umi Narimawati:2007, dengan hasil skor tanggapan responden sebesar 73%, termasuk dalam kategori baik.

Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Kinerja pada auditor di Inspektorat Kota Bandung berdasarkan tiap indikator diatas:

5. Komitmen

Indikator komitmen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 19. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Komitmen

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
28	Di dinas yang anda audit, ketaatan aturan dan sanksi ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	F	0	0	8	12	0	72
		%	0	0	40	60	0	100%

Total	F	0	2	8	12	0	72
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 72%							

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 72% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{1x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{72}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 72%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai ketaatan aturan dan sanksi ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditanggapi 40% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 60% responden menanggapi baik mengenai, ketaatan aturan dan sanksi ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya-Sumber Daya Secara Konsisten

Indikator sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 20. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sistem yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya-Sumber Daya secara Konsisten

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
29	Di dinas yang anda audit, Kejelasan wewenang dan tanggung jawab ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	F	0	0	1	19	0	79
		%	0	0	5	95	0	100%
30	Di dinas yang anda audit, Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemeritah	F	0	0	3	17	0	77
		%	0	0	15	85	0	100%
31	Di dinas yang anda audit, Volume pekerjaan berimbang dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	F	0	0	6	14	0	74
		%	0	0	30	70	0	100%

Total	F	0	0	10	50	0	230
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 76,67%							

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.20 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 76,67% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{3x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{300} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 76,67%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai kejelasan wewenang dan tanggung jawab ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditanggapi 5% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 95% responden menanggapi baik mengenai, kejelasan wewenang dan tanggung jawab ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemeritah, sebesar 15% tanggapan responden cukup baik dan 80% responden berpendapat baik mengenai mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan ada dalam akuntabilitas kinerja instansi pemeritah.

Diperoleh jawaban responden mengenai, Volume pekerjaan berimbang dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebesar 30% tanggapan responden cukup baik dan 80% responden berpendapat baik mengenai Volume pekerjaan berimbang dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan

Indikator Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 21 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Telah Ditetapkan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
32	Di dinas yang anda audit, mutu pekerjaan diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	F	0	0	7	13	0	73
		%	0	0	35	65	0	100%
Total		F	0	0	7	13	0	73
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.21 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 73% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{1x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{73}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 73%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai mutu pekerjaan diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, ditanggapi 35% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 65% responden menanggapi baik mengenai, mutu pekerjaan diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

8. Orientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh

Indikator Orientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 22. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Orientasi pada Pencapaian Visi dan Misi serta Hasil dan Manfaat yang Diperoleh

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
33	Pegawai memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	F	0	0	12	8	0	68
		%	0	0	60	40	0	100%
Total		F	0	0	12	8	0	68
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 68%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.22 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 68% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{68}{1x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{68}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 68%

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai Pegawai memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditanggapi 60% tanggapan responden cukup baik dan sebesar

40% responden menanggapi baik mengenai, Pegawai memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

9. Jujur, Objektif, Transparan, Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan

Indikator jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan yang diperoleh diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 23. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jujur, Objektif, Transparan, Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
34	Di dinas yang anda audit, Kejujuran aparatur dan transparansi lembaga jelas diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	F	0	0	8	12	0	72
		%	0	0	40	60	0	100%
35	Di dinas yang anda audit, Mengemukakan gagasan baru dan mengadakan perubahan dan diterapkan dalam akuntabilitas	F	0	0	11	9	0	69
		%	0	0	55	45	0	100%

	kinerja instansi pemerintah							
Total		F	0	0	19	21	0	141
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 70,5%								

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.23 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 70,5% bila merujuk pada tabel termasuk dalam kategori baik.

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{141}{2x5x20} \text{ X } 100$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{141}{100} \text{ X } 100$$

% skor tanggapan responden = 70,5%

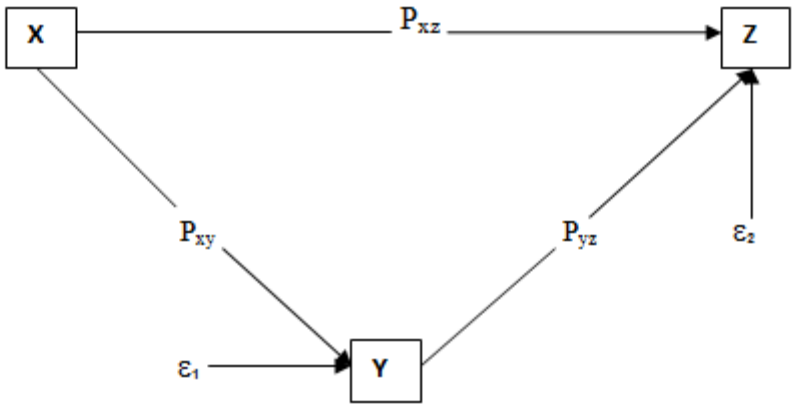
Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai kejujuran aparatur dan transparansi lembaga jelas diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditanggapi 40% tanggapan responden cukup baik dan sebesar 60% responden menanggapi baik mengenai, kejujuran aparatur dan transparansi lembaga jelas diutamakan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Diperoleh jawaban responden mengenai, Mengemukakan gagasan baru dan mengadakan perubahan dan diterapkan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebesar 55% responden menanggapi cukup baik dan 45% responden

menanggapi baik mengenai, Mengemukakan gagasan baru dan mengadakan perubahan dan diterapkan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4 Analisis Verifikatif

Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga Akuntabilitas Kinerja diharapkan juga akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian pada tahap kedua akan diuji Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya pada Akuntabilitas kinerja. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 1. Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Sumber: Umi Narimawati 2011

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$Y = P_{YX}X + \varepsilon_1$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2$$

Keterangan :

Z = Akuntabilitas Kinerja

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daearah

X = Standar Akuntansi Pemerintahan

PYX = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan

PZX = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja

PYZ = koefisienjalur kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja, terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.*

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software *SPSS 17.0* dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4. 24. Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Kolerasi

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat longgar, dapat diabaikan
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Moderat/Cukup
0,61 – 0,80	Erat
0,81 – 1,00	Sangat Erat

Sumber: Umi Narimawati (2010:52)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X), variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan variabel dependen Akuntabilitas Kinerja (Z), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,555. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas Kinerja(Z) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xz} = \frac{n \sum XZ - \sum X \sum Z}{\sqrt{[(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Z^2 - (\sum Z)^2)]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas Kinerja (Z) sebesar 0,784. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas Kinerja (Z) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{yz} = \frac{n \sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{[(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2) \times (n \sum Z^2 - (\sum Z)^2)]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas Kinerja (Z) sebesar 0,507. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0* diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4. 25. Kolerasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

			x	y	z
Spearman's rho	x	Correlation Coefficient	1,000	,555*	,784**
		Sig. (2-tailed)	.	,011	,000
		N	20	20	20
	y	Correlation Coefficient	,555*	1,000	,507*
		Sig. (2-tailed)	,011	.	,023
		N	20	20	20
	z	Correlation Coefficient	,784**	,507*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	,023	.
		N	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintaha (X) dangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,555 dan masuk dalam kategori sedang. Arah

hubungan positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menujukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan Akuntabilitas Kinerja (Z) sebesar 0,784 termasuk dalam kategori kuat, demikian juga hubungan antara Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas Kinerja (Z) sebesar 0,507 termasuk dalam kategori sedang dengan arah positif.

4.4.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Secara Parsial.

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pengaruhnya signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t, dengan formula sebagai berikut:

$$t = r\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r^2)}}$$

4.4.1.1 **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hipotesis:

Ho: $\rho zx = 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Ha: $\rho ZX \neq 0$: Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berikut ini hasil perhitungan pengaruh leverage keuangan terhadap harga saham dengan menggunakan *software* SPSS 17.0:

Tabel 4. 26. Koefisien Jalur Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja

Coefficients[a]

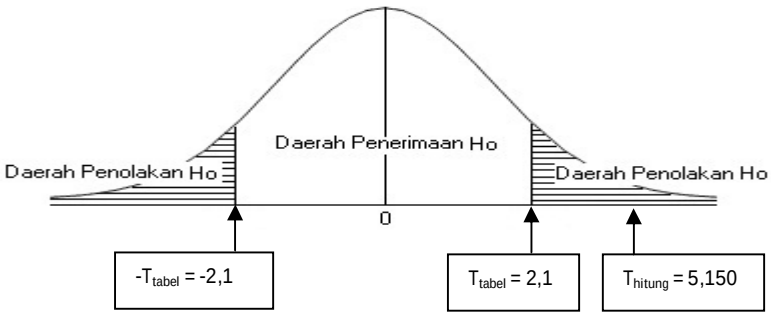
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5,060	2,404		2,105	,050			
	x	,421	,082	,772	5,150	,000	,772	,772	,772

a. Dependent Variable: z

Nilai statistik uji t sebesar 5,150 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 17 diperoleh nilai sebesar 2,1. Karena t_{hitung} (5,150) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,1) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung. Seperti yang diungkapkan Winner Jihad Akbar pada Tesisnya, bahwa Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Artinya sebagian besar akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintah.

Gambar 4. 2. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja



4.4.1.2 **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Ha: $\rho ZY \neq 0$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berikut ini hasil perhitungan pengaruh Kualitas Laporan keuangan

Tabel 4. 27 Koefisien Jalur Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	8,040	3,295		2,440	,025			
	y	,388	,137	,554	2,824	,011	,554	,554	,554

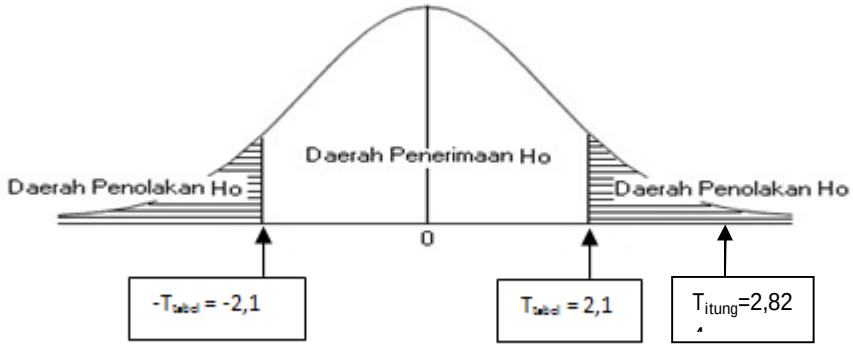
a. Dependent Variable: z

terhadap akuntabilitas kinerja dengan menggunakan *software* SPSS 18.0:

Nilai statistik uji t sebesar 2,824 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.20, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 17 diperoleh nilai sebesar 2,1. Karena t_{hitung} (2,824) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,1) maka pada tingkat kekelialruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung. Seperti yang diungkapkan oleh Urip Santoso dan Yohanes Joni Pambelum (2008:19) bahwa adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas yaitu:

> "Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor publik dan Pengawasan terhadap Kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama."

Gambar 4. 3. Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Akuntabilitas Kinerja



4.4.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Secara Simultan

4.4.2.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada sub struktur yang pertama variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (Standar Akuntansi Pemerintahan), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. (P_{YX}) = r_{xy} = (0,555)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0* diperoleh koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 28. Koefisien Jalur Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	9,018	4,123		2,187	,042			
	x	,502	,140	,645	3,581	,002	,645	,645	,645

a. Dependent Variable: y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,645 pada tabel 4.28 merupakan nilai koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0* diperoleh koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 29. Koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,645[a]	,416	,384	4,11514	,867

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: y

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 41,6% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung, sementara sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Standar Akuntansi Pemerintahan. Yaitu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana,Transparansi (Purnawiati Nugraheni dan Imam Subaweh 2008).

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_0 : \rho_{yx} = 0$ Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_1 : \rho_{xy} \neq 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji hipotesisi diatas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut:

$$t = r\sqrt{\frac{n-k-1}{(1-r^2)}}$$

$$t = 0{,}555\sqrt{\frac{20-2-1}{(1-0{,}555^2)}}$$

$$t = 0{,}555\sqrt{\frac{17}{0{,}692}}$$

$$t = 0{,}555 \times 4{,}96$$

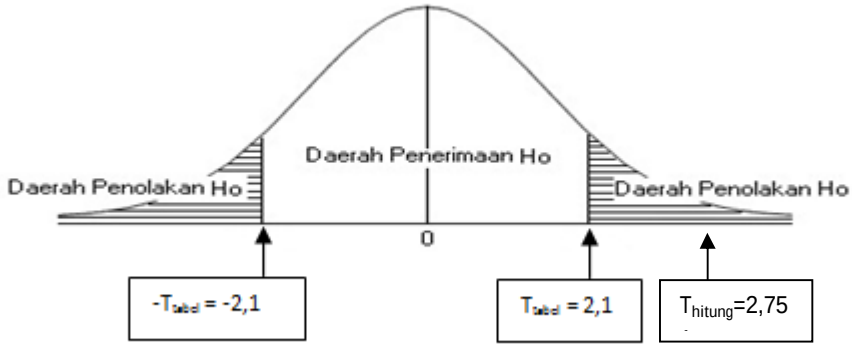
$$t = 2{,}751$$

Jadi diperoleh nilai statistik uji t sebesar 2,751. Kriteria pengujiannya adalah, ”Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$”, dimana dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 17 diperoleh nilai t sebesar 2,1. Karena t_{hitung} (2,751) lebih besar dibanding t_{tabel} (2,1) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung. Artinya Kualitas Laporan keuangan dapat dinilai oleh variabel Standar Akuntansi Pemerintah. Seperti pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

Gambar 4. 4. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah



Pada gambar 4.3 dapat dilihat t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.

4.4.2.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja

Pada sub struktur yang kedua variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan Akuntabilitas sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyususn matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

$$R = \begin{matrix} X \\ Y \end{matrix} \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}555 \\ 0{,}555 & 1{,}000 \end{bmatrix}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

$$R^{-1} = \begin{matrix} X \\ Y \end{matrix} \begin{bmatrix} 1{,}445 & -0{,}802 \\ -0{,}802 & 1{,}445 \end{bmatrix}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dengan Akuntabilitas Kinerja.

$$R = \begin{matrix} & Z \\ X & 0{,}784 \\ Y & 0{,}507 \end{matrix}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{xz} \\ P_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}445 & -0{,}802 \\ -0{,}802 & 1{,}445 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}784 \\ 0{,}507 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{xz} \\ P_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}726 \\ 0{,}103 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,726 dan koefisien jalur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,103 Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0* diperoleh koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4. 30. Jalur Koefisien Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	4,452	2,764		1,610	,126	-1,381	10,285
	x	,387	,109	,710	3,541	,003	,156	,618
	y	,067	,140	,096	,480	,637	-,229	,364

a. Dependent Variable: z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,710 dan 0,096 pada tabel 4.29 merupakan nilai koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja.

5) Menghitung Koefisien Determinasi.

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan Akuntabilitas Kinerja.

$$R^2_{z(xy)} = [0{,}762 \quad 0{,}103] x \begin{bmatrix} 0{,}784 \\ 0{,}507 \end{bmatrix}$$

$$R^2_{z(xy)} = 0{,}649$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS.18* diperoleh koefisien determinasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4. 31. Koefisien Determinasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Model Summary[b]

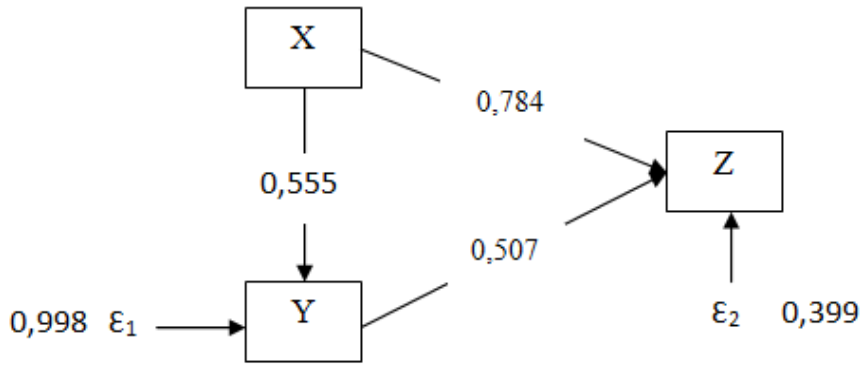
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,775[a]	,601	,554	2,45238	,601	12,811	2	17	,000	2,082

a. Predictors: (Constant), y, x

b. Dependent Variable: z

Melalui nilai koefisien determinasi (R Squ`are) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 60,1% terhadap kepatuhan Akuntabilitas pada Dinas Bandung. Sisanya sebesar 39,9% merupakan pengaruh faktor lain yaiu diantaranya transparansi, Modernisasi Administrasi Perpajakan (Dianasari,Rachmawati, Rima 2010), dan diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap Akuntabilitas pada Dinas Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 5 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua



Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

a) Besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

Pengaruh langsung Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas = $(P_{ZX})^2$ = (0,784) x (0,784) = 0,614 (61,4%). Pengaruh tidak langsung Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja = P_{ZX} X r_x X P_{ZX} = (0,555) x (0,507) x (0,784) = 0,22(22%).

Jadi total pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung. = 61,4% + 22% = 83,4% dengan arah positif. Artinya Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

b) Besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung..

Pengaruh langsung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja $(P_{ZY})^2$ = (0,507) x (0,507) = 0,257 (25,7%). Pengaruh tidak langsung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja = P_{ZX} X r_x X P_{ZX} = (0,555) x (0,507) x (0,784) = 0,22(22%).

c) Jadi total pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.. = 25,7% + 22% = 47,7% dengan arah positif. Artinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

6) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh yang signfikan terhadap Akuntabilitas n baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian ara parsial.dan dilanjutkan dengan pengujian secara simultan

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Akuntabilitas

Ha: ρzx ≠ ρzy ≠ 0 Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji F dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n - k - 1)}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

$$F = \frac{0{,}601/2}{(1 - 0{,}601)/(20 - 2 - 1)}$$

$$F = \frac{0{,}3}{0{,}023}$$

$$F = 13{,}04$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0* diperoleh nilai F_{hitung} pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas sebagai berikut.

Tabel 4. 32. Uji Anova untuk Uji Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154,092	2	77,046	12,811	,000[a]
	Residual	102,240	17	6,014		

	Total	256,332	19			

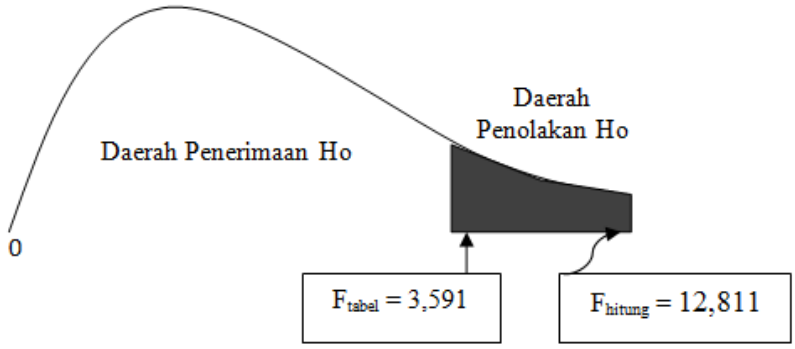
a. Predictors: (Constant), y, x

b. Dependent Variable: z

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 12,811 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000. Sementara dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;20-2-1) diperoleh $F_{0,005(2:20)}$ = 3,59. Karena F_{hitung} (12,811) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,59) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung. Artinya Standar Akuntansi Pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut.

Gambar 4. 6. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja



Pada gambar 4.5 dapat dilihat F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kota Bandung.